

PERJUANGAN ORGANISASI GURU DI MASA REVOLUSI SEJARAH PGRI DI AWAL PENDIRIANNYA

Ahmad Kosasih

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FIPPS
Universitas Indraprasta PGRI – Indonesia 12530
Email: aseng.kosasih@gmail.com

ABSTRACT

Early education in independent Indonesia become one of the important aspects to foster the spirit of nationalism and promoting the ideals of independence of the Republic of Indonesia. Indonesian government attention newborn and some of the figures revolutionist who realized that education is very important to foster the spirit of nationalism and efforts to create awareness of an independent nation. Based on the subjects of education and new teaching drafted by the Committee of Inquiry Teaching goals and educational foundation and a system of schooling that characterizes to Indonesiaan. Organization of Indonesian Teachers Association, as a teachers Indonesian container that has been since the days of the Dutch East Indies. Since the proclamation of PGRI organization establishes itself as a fighter who helped defend the independence and sovereignty of Indonesia NKRI. This organization is a manifestation of the Indonesian teacher in taking part and responsibility in accordance with his profession as an educator for the independence aspired. The organization therefore seen as a unifier of teachers who are: 1) a unitary, 2) independent, 3) non-political. It is also a tool, a vehicle in the interests of the teachers for their professional development, education in general and devotion to the homeland and the nation.

Keywords: History of education; nationalism; Indonesian revolution; PGRI

ABSTRAK

Pendidikan di awal Indonesia merdeka menjadi salah aspek penting untuk menumbuhkan semangat memperjuangan nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Perhatian pemerintah Indonesia yang baru lahir dan sebagian dari tokoh-tokoh pejuang revolusi yang sadar bahwa bidang pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta upaya untuk menanamkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka. Berdasarkan pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru oleh Panitia Penyelidik Pengajaran disusunlah tujuan dan landasan pendidikan serta sistim persekolahan yang mencirikan ke Indonesiaan. Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai wadah para guru Indonesia yang sudah sejak masa Hindia Belanda. Sejak proklamasi organisasi PGRI menetapkan dirinya sebagai organisasi pejuang yang turut mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia NKRI. Organisasi ini merupakan manifestasi kaum guru Indonesia dalam mengambil bagian dan tanggung jawab sesuai dengan bidang profesinya sebagai pendidik untuk mengisi kemerdekaan yang dicita-citakan. karenanya organisasi ini dipandang sebagai pemersatu kaum guru yang bersifat: 1) unitaris, 2) independen, 3) non partai politik. Juga merupakan suatu sarana, wahana dalam kepentingan kaum guru bagi pengembangan profesinya, pendidikan pada umumnya serta pengabdianya kepada tanah air dan bangsa.

Kata kunci: Sejarah pendidikan; nasionalisme; revolusi Indonesia; PGRI

PENDAHULUAN

Revolusi Indonesia telah merubah tatanan kehidupan Bangsa Indonesia termasuk bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan tidak hanya yang bersifat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian dengan cita-cita dari suatu bangsa dan atau Negara yang baru merdeka. Namun, Panitia Penyelidik Pengajaran yang di ketuai oleh Ki Hadjar Dewantara telah berhasil merumuskan landasan *idiil* yaitu Pancasila, tujuan pendidikan, sistem sekolah serta kesempatan belajar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan pada masa revolusi dirumuskan bahwa pendidikan bertujuan mendidik warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara dan Masyarakat. Pada awal kemerdekaan, pendidikan Indonesia lebih menekankan kepada bagaimana menanamkan rasa nasionalisme dan berjiwa patriotisme untuk mempertahankan kemerdekaan.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi pintu gerbang bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasionalisme yang selama ini menjadi alat pemersatu para pejuang. Proklamasi juga menjadi pendorong bagi perjuangan guru-guru Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara mendidik bangsanya agar menjadi manusia yang cerdas dan berpengetahuan sehingga tidak dapat dijajah lagi oleh bangsa asing. Di saat revolusi sedang bergelora, guru-guru pun tidak mau ketinggalan untuk ikut membantu para tentara, masyarakat, dan pejuang lainnya, yang sedang melawan Belanda. Guru-guru Indonesia tidak mau lagi bangsa Indonesia yang telah merdeka di jajah kembali dan upaya mereka tidak hanya dalam bentuk kegiatan langsung sebagai masyarakat, tetapi dengan peran sebagai pendidik, mereka terus memberikan kesadaran akan semangat perjuangan kepada anak didiknya.

Terbentuknya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia adalah hasil dari perjuangan guru-guru Indonesia. Sejarah perjuangan kaum Guru, memang telah dimulai dari masa Hindia Belanda dengan adanya organisasi Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912. Persatuan Guru Hindia Belanda kemudian mengalami perubahan menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Pada tanggal 23-25 November 1945 diadakan kongres Guru, yang menghasilkan Persatuan Guru Republik Indonesia. Dalam situasi perjuangan rakyat melawan Sekutu, guru-

guru mengadakan kongres yang dilaksanakan di Sekolah Guru Puteri (SGP) gedung Van De Vanter, sekarang SMP 3 Surakarta Jawa Tengah. Sebagai penggerak dan pemimpin adalah Amin Singgih dan Rh. Koesnan. Kongres dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 25 November 1945. Hasil kongres tersebut adalah guru-guru sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang bisa mewartakan aspirasi dan perjuangan guru untuk kemajuan bangsa Indonesia. Atas usulan dari Persatuan Guru Seluruh Perangan (PGSP) dari Jawa Barat yang mengusulkan nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Seluruh peserta kongres sepakat dan menyetujui berdirinya suatu organisasi yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Setelah terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Republik Indonesia terus berjuang menggalang persatuan dengan mengajak guru-guru di daerah untuk bergabung ke dalam PGRI. Namun, perjuangan itu tidaklah mudah karena mendapat rintangan dari pihak Belanda. Persatuan Guru Republik Indonesia merasa bangga dikarenakan Rh. Koesnan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan Sosial dalam kabinet Moh. Hatta. Peran Persatuan Guru Republik Indonesia pada masa Revolusi Indonesia adalah ikut merumuskan tujuan Pendidikan Indonesia.

Dari uraian latar belakang di atas dalam tulisan bermaksud mengangkat kembali tentang "Perjuangan Organisasi Guru di Masa Revolusi dengan melihat lebih jauh kiprah organisasi PGRI di awal pendiriannya. Sebagaimana disebutkan, diawal kemerdekaan peran organisasi PGRI menjadi sangat penting dalam menentukan Landasan dan Tujuan Pendidikan Nasional dan Sistem Sekolah serta pembentukan sebagai organisasi perjuangan yang turut serta mengawal dan mengisi kemerdekaan.

PEMBAHASAN

Memahami revolusi Indonesia

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan merupakan bagian penting dari kisah sentral sejarah Indonesia. Gerak revolusi menjadi unsur yang kuat dalam membentuk persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Tradisi nasional berikutnya yang menggambarkan rakyat Indonesia berjuang bahu membahu selama Revolusi hanya mempunyai sedikit dasar sejarah. Akan tetapi, keyakinan

bahwa itu merupakan zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahwa hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atas nama Revolusi, memang didukung banyak fakta. (Ricklefs, 2008:446).

George McTurman Kahin (1995) dalam bukunya menjelaskan tentang Revolusi Indonesia, empat tahun pertama dari kehidupan Republik didominasi oleh peperangan melawan musuh-musuh yang kuat, suatu peperangan yang hasilnya diterima oleh para pemimpinnya sebagai menentukan tetap hidupnya Republik. Baik perundingan-perundingan yang lama antara Republik dan Belanda dan juga politik ke dalam Revolusi Indonesia harus dilihat berdasarkan latar belakang kenyataan bila ingin memahaminya. Sjahril dan kelompoknya menolak untuk mendukung proklamasi pada tanggal 17 Agustus, dan menghindari rapat yang diadakan pada malam sebelumnya di rumah Mayda. Mereka khawatir kalau deklarasi Soekarno dan Hatta terlalu lemah membawa rakyat Indonesia ke puncak Revolusi yang diperlukan untuk melawan Jepang. Sjahril merasa tidak mampu menyangkal Revolusi yang dipimpin Soekarno, dan begitu kembali ke Jakarta, ia menerima permintaan Soekarno dan Hatta untuk bergabung memimpin Revolusi. (Kahin, 1995:185).

Revolusi ini mempunyai pengaruh psikologis umum yang besar sekali. Sementara mengusahakan perubahan mendasar dalam status politik Indonesia, revolusi tersebut juga membawa perubahan luas yang menyolok dalam ciri bangsa Indonesia. Selama periode enam tahun, 1945-1950, keterlibatan pribadi dan martabat kebersamaan, rasa menghargai diri sendiri dan rasa percaya pada diri sendiri berkembang pesat. Yang paling menyolok adalah perubahan dalam karakter generasi muda. Selama tahun-tahun kritis, 1945-1950 unsur paling dinamis dalam revolusi itu adalah sektor pemuda terpelajar Indonesia. Tanpa penerahan kekuatan mereka, revolusi Indonesia tidak akan berhasil. (Kahin, 1995:596).

Kebijakan Pendidikan Indonesia Periode Awal Revolusi

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja tetapi juga dalam bidang

pendidikan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan-perubahan yang bersifat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian dengan cita-cita dari suatu bangsa dan negara merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, maka bidang pendidikan mengalami perubahan dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. (Depdikbud.1979:93).

Dalam UUD 1945 dasar dan falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila. Maka, dasar dan falsafah inilah yang kemudian dijadikan landasan idiil pendidikan Indonesia. Walaupun dalam periode 1945-1950, Negara kita mengalami perubahan UUD, tetapi dasar dan falsafah negara tidak mengalami perubahan. Oleh karena itulah Pancasila tetap dijadikan landasan idiil pendidikan Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 1945 badan pekerja KNIP mengusulkan kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, supaya pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru. Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran baru yaitu:

1. Untuk menyusun masyarakat baru perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran. Paham perseorangan yang kini berlaku haruslah diganti dengan paham kesusahaan dan peri kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga Negara yang mempunyai rasa tanggung jawab.
2. Untuk memperkuat persatuan rakyat kita hendaknya diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat.
3. Methodik yang berlaku di sekolah-sekolah hendaknya berdasarkan sistem sekolah kerja agar aktivitas rakyat kita terhadap pekerjaan biasa berkembang seluas-luasnya. Disamping itu, harus ada perguruan-perguruan pemimpin masyarakat untuk tiap-tiap lapangan usaha yang penting. Untuk keperluan pengajaran orang dewasa ini hendaklah diadakan kantor pusatnya sendiri.
4. Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur, seksama sehingga tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan

yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya.

5. Madrasah dan pesantren-pesantren yang ada pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan materil dari pemerintah.
6. Pengajaran tinggi hendaklah diadakan seluas-luasnya dan jika perlu dengan menggunakan bantuan bangsa asing sebagai guru besar. Lain dari itu hendaklah diusahakan berlakunya pengiriman pelajar-pelajar keluar negeri untuk keperluan Negara.
7. Kewajiban belajar dengan lambat laun dijalankan dengan ketentuan bahwa dengan tempo yang sesingkat-singkatnya paling lama sepuluh tahun bias berlaku sempurna dan merata.
8. Pengajaran teknik dan ekonomi terutama pengajaran pertanian, industri dan perikanan hendaklah mendapat perhatian istimewa.
9. Pengajaran kesehatan dan olahraga hendaklah teratur, sebaik-baiknya sehingga terdapat kemidiam hasil kecerdasan rakyat yang harmonis.
10. Disekolah rendah tidak dipungut uang sekolah, untuk sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi hendaklah diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas. Sehingga soal keuangan jangan menjadi halangan bagi pelajar-pelajar yang kurang mampu.

Atas usul badan pekerja kemudian Menteri Pendidikan dan Pengajaran (Mr. Soewandi) membuat Surat Keputusan tanggal 1 Maret 1946 No. 104/Bhg.O untuk membentuk panitia Penyelidik Pengajaran dibawah Ki Hadjar Dewantara dan penulis Soegarda Purwakawaja.

Tugas yang dibebankan kepada panitia ini diantaranya :

1. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah
2. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat
3. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979:94-95).

Didalam UUD 1945, dengan jelas dinyatakan bahwa setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan Pendidikan, adalah tugas

pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan rakyat, artinya ialah memberikan kesempatan kepada semua warga Negara untuk memperoleh Pendidikan. (Tilaar, 2002 :69)

Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai Agama, Kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sejarah pendidikan Indonesia zaman kemerdekaan berawal dari Proklamasi Kemerdekaan, dimana Proklamasi Kemerdekaan menimbulkan hidup baru disegala bidang khususnya di bidang Pendidikan.

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan Republik Indonesia segera menunjuk Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Jabatan ini dipegangnya sampai tanggal 14 November 1945, kemudian diganti oleh Mr. T.G.S.G. Mulia sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sampai 12 Maret 1946. Kemudian diganti oleh Muhammad Sjafei dari tanggal 12 maret 1946 sampai dengan 2 oktober 1946. Kemudian diganti lagi oleh Mr. Suwandi. Pada masa Mr. Suwandi telah dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia di Jogjakarta, yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara merangkap anggota. Panitia ini dibentuk berdasarkan keputusan rapat badan pekerja KNIP tanggal 27 Desember 1945 atas pertimbangan pemerintah, bahwa untuk pembentukan negara dan masyarakat baru perlu diadakan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Berdasarkan surat keputusan No. 60 Bhg umum, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 12 Mei 1946 telah mengesahkan anggota penyidik pengajaran Republik Indonesia yang terdiri dari 52 orang anggota. Anggota panitia tersebut diambil dari semua lapisan dan aliran yang ada mencakup semua lapangan dan tingkatan. Panitia ini bertugas meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari usia 3 tahun hingga dewasa, atau dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dengan segala macam coraknya. Soal-soal agama, budi pekerti, budaya, angkatan perang dan soal pendidikan orang dewasa menjadi pembicaraan penting dalam rapat-rapat tersebut. Sebagai pedoman kerja panitia menteri Suwandi telah mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:

- a. Panitia bertugas merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah.
- b. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat.
- c. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk fasilitas, dengan disertai daftar-daftar dan keterangan-keterangan yang langsung. (Kartodirdjo, dkk. 1975: 263-264).

Pada tahun 1946 menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Mr. Suwandi) membentuk panitia penyelidikan pengajaran yang diketuai oleh Ki Hdajar Dewantara. Tugas panitia untuk meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan dan seluruh pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, panitia tersebut mengadakan kongres di dua tempat yaitu kongres pendidikan di Solo (1947) dan kongres pendidikan di Jogjakarta (1949)

Setelah kongres pendidikan di Jogjakarta berakhir pada tahun 1949. Maka bertambahlah bahan-bahan untuk penyusunan Undang-undang pokok pendidikan yang dilakukan oleh panitia. Panitia meresmikan Rencana Undang-undang menjadi Undang-undang No.4 tahun 1950 dengan Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (UUPP).

Pada bulan Desember 1949, Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan. Undang-undang 1945 diganti dengan konstitusi Sementara Republik Indonesia. Walaupun dasar pendidikan tidak mengalami perubahan, tujuan pendidikannya mengalami perubahan. Pada tanggal 2 April 1950, ditetapkan Undang-undang No.4 tahun 1950 mengenai Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk kemudian diundangkan pada tanggal April 1950 oleh Menteri Kehakiman A. G Pringgodigdo. Undang-undang tersebut hanya berlaku diwilayah Republik Indonesia (sementara) sebagian dari Republik Indonesia Serikat. Dasar pendidikan Nasional dirumuskan sebagai berikut : Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan azas-azas yang termaktub dalam Pancasila, dan azas kebudayaan Indonesia. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996:88 dan 90).

Tujuan Pendidikan Nasional di Awal Indonesia Merdeka

Salah satu hasil panitia penyelidik pengajaran pada waktu itu adalah memberikan perumusan tentang tujuan pendidikan nasional. Hasil rumusannya adalah bahwa pendidikan bertujuan mendidik Warga Negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa tersebut menekankan pada pemahaman semangat dan jiwa kepahlawanan (patriotisme). Sifat warga negara sejati yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan pada waktu itu dirumuskan oleh menteri Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Kemudian pada tahun 1946 rumusan tersebut dituangkan ke dalam suatu pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan yang pada dasarnya berintikan Pancasila, yaitu:

1. Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Perasaan cinta kepada alam
3. Perasaan cinta kepada Negara
4. Perasaan cinta dan hormat kepada Ibu dan Bapak
5. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan
6. Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan Negeranya menurut pembawaan dan kekuasaannya
7. Keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisah dari keluarga dan masyarakat.
8. Keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib.
9. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya. Sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri.
10. Keyakinan bahwa Negara memerlukan warga Negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, jujur dalam pikiran dan tindakan. (Depdikbud, 1996:88).

Tentang tujuan Pendidikan dan Pengajaran diarahkan kepada usaha membimbing murid-murid agar menjadi warga Negara yang mempunyai rasa tanggung jawab. (Kartodirdjo, 1975 :265).

Penanaman semangat patriotisme, sebagai tujuan pendidikan memang sesuai dengan situasi pada waktu itu. Negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik, dan sewaktu-waktu pemerintah kolonialis Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali Negara Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa semangat patriotisme sangat ditekankan

oleh pemerintah sebagai tujuan nasional pendidikan di Indonesia. Maka, dengan semangat itu, kemerdekaan dapat dipertahankan dan diisi. (Depdikbud, 1979 :95-96).

Demokratisasi yang dilakukan pemerintah yang dilakukan pemerintah di bidang pendidikan sejak zaman merdeka terutama ditujukan untuk pemerataan dan menyamakan kesempatan bersekolah yang dituangkan dan dijamin dalam UUD 1945.

Sistem Persekolahan atau sistem Pendidikan

Aktivitas sekolah selama ini dirumuskan sebagai proses belajar secara terstruktur, berpedoman kepada kurikulum, dilakukan oleh murid dengan bimbingan guru untuk menyelesaikan tahap-tahap tujuan yang terprogram. Tiap tahap dilalui setelah ujian. (Ali,:75).

Sistem pendidikan pada periode Revolusi Indonesia mengalami berbagai perubahan. Salah satu bentuk perubahan tersebut menyangkut pula sistem persekolahan. Pada zaman penjajahan Belanda, pendidikan sekolah digolongkan atas dasar golongan masyarakat, baik golongan berdasarkan bangsa maupun status sosial. Penggolongan tersebut dihapuskan sejak pendudukan Jepang. Sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka tetap berdasarkan satu jenis sekolah untuk tiap tingkat. Seperti pada zaman Jepang, sedangkan rencana pelajaran pada umumnya sama dan Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa pengantar untuk seluruh sekolah. Perkembangan yang pesat dibidang pendidikan dapat dilihat dari makin tingginya semangat rakyat untuk memasukiberbagai jenjang persekolahan baik untuk pendidikan rendah, menengah maupun tinggi. Sistem persekolahan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 meliputi pendidikan rendah, umum, Guru, kejuruan, teknik dan pergruan tinggi. Pendidikan rendah adalah pedidikan sekolah dasar yang sejak awal kemerdekaan, disebut Sekolah Rakyat (SR). Lama pendidikan yang semula tiga tahun diubah menjadi enam tahun. Maksud pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan dan menampung hasrat yang besar dari mereka yang ingin bersekolah. Sebagai kelanjutannya adalah Sekolah Menengah Pertama Shoto chu Gakko) dan Sekolah Menengah Tinggi (Koto chu Gakko). Lama pendidikannya tiga tahun untuk SMP dan tiga tahun untuk SMT. Pendidikan umum terdiri dari

dua jenis, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Lama pendidikan SMP adalah tiga tahun sedangkan SMT merupakan pendidikan tiga tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pendidikan guru adalah sekolah yang diadakan untuk menghasilkan guru. Jenis pendidikan guru adalah : sekolah Guru B lama pendidikan empat tahundan menjadi guru SR, Sekolah Guru C lama pendidikan dua tahun, Sekolah Guru A lama pendidikan tiga tahun.

Pendidikan kejuruan terdiri dari pendidikan ekonomi dan kewanitaan. Pendidikan ekonomi yang pertama adalah Sekolah Dagang yang lama pendidikannya tig tahun sesudah SR. Pendidikan kewanitaan adalah Sekolah Kepandaian Putri (SKP) yang lama belajarnya tiga tahun setelah SR dan Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) yang lama belajarnya empat tahun setelah SMP atu SKP. Pendidikan Teknik terdiri dari kursus Kerajinan Negeri (KKN). Sekolah Tenik Pertama Sekolah Teknik, Sekolah Teknik Menengah dan Pendidikan Guru untuk sekolah teknik. Lama kursus kerajinan negeri adalah satu tahun dan merupakan pendidikan teknik terendah setelah SD enam tahun. Terdiri dari jurusan kayu, besi, sepeda, anyaman, perabot rumah, las, dan batu. Lama pendidikan STP dua tahun sesudah SR dan terdiri dari jurusan kayu, batu, perabot rumah, anyaman, besi, listrik, mobil, keramik, cetak, tenun, kulit, motor, ukur tanah,dan cor. Pendirian sekolah teknik bertujuan mendapatkan tenaga tukang yang terampil, tetapi disertai pengetahuan teori. Lama pendidikan ST dua tahun setelah STP atau SMP bagian B dan meliputi jurusan bangunan gedung, bangunan air dan jalan, bangunan mesin, bangunan listrik, bangunan radio, bangunan kapal, percetakan, dan pertambangan. ST bertujuan mendidik tenaga pengawas bangunan. Lama pendidikan STM empat tahun setelah SMP bagian B atau ST dan terdiri dari jurusan bangunan gedung, bangunan sipil, bangunan kapal, bangunan mesin, bangunan listrik, bangunan mesin kapal, bangunan mesin kapal, kimia, dan pesawat terbang. STM bertujuan mendidik tenaga ahli teknik dan pejabat teknik menengah.

Pendidikan guru teknik adalah untuk menghasilkan guru teknik melalui sekolah/kursus untuk mendapatkan ijazah A teknik, khusus untuk guru STP jurusan bangunan B I Teknik khusus untuk guru ST/STM tingkat I jurusan

bangunan sipil, bangunan gedung, mesin dan listrik. Ijazah B II Teknik kh usus untuk guru STM jurusan bangunan sipil, bangunan gedung sipil, bangunan gedung, mesin dan listrik. Pendidikan pada waktu itu terpecah menjadi dua yaitu Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi Daerah Pendudukan Belanda. (Depdikbud, 1979).

Usaha perjuangan organisasi Guru dari masa kolonial sampai Indonesia merdeka

a. Sejarah organisasi Guru dari masa Hindia Belanda

Kesadaran nasional, kesadaran akan persatuan bangsa dan kesadaran korps profesi guru sebenarnya sudah lahir sebelum perang dunia ke-2. Lahirnya Budi Utomo 1908 dipelopori oleh dr. Sutomo, R. Ng Sudiro Husodo, dr. Cjipto Mangunkusumo memutuskan perjuangan melalui idiologi pendidikan untuk memperjuangkan nasib bangsa kita selama dijajah Belanda.

Perang Dunia II pecah tahun 1939, setahun kemudian, negeri Belanda diduduki oleh tentara Jerman. Pada tahun 1941 semua guru laki-laki bangsa Belanda ditugaskan untuk menjadi milisi. Untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia, beberapa sekolah sejenis digabungkan dan gurunya diisi oleh orang-orang Indonesia. Akan tetapi, pada zaman pendudukan Jepang keadaan sama sekali berubah. Segala organisasi dilarang, sekolah ditutup. Praktis segala kegiatan pendidikan dan kegiatan politik, membeku. Barulah menjelang Jepang takluk kepada tentara sekutu, sekolah-sekolah itu mulai dibuka kembali. (Yunus dkk, 2003 : 6)

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah didirikan termasuk sekolah untuk mencetak guru. Didirikanlah Pendidikan Keguruan (*Kweekschool*). Lembaga pendidikan keguruan ini adalah lembaga yang tertua dan sudah ada sejak permulaan abad kesembilan belas. Mula-mula yang mendirikan adalah kalangan – kalangan *Zending* dan *Missie* berupa kursus-kursus. Sekolah Guru Negeri yang pertama, didirikan pada tahun 1851 di Surakarta. Sebelum itu diberi nama *Normal Cursus* yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru sekolah desa. Pada abad kedua puluh sejalan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan, maka, pendidikan guru juga

mengalami perubahan. Dan akhirnya terdapat tiga macam, yaitu: 1. *Normaalschool*, sekolah guru dengan masa pendidikan empat tahun dan menerima lulusan sekolah dasar lima tahun. Berbahasa pengantar bahasa daerah. 2. *Kweekschool*, sekolah guru empat tahun yang menerima lulusan sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda. 3. *Hollandsch Inlandsche Kweekshhool*, sekolah guru enam tahun berbahasa pengantar Belanda dan bertujuan menghasilkan guru-guru HIS/HCS.

Di samping sekolah tersebut di atas masih terdapat kursus-kursus yang diselenggarakan oleh swasta terutama lembaga keagamaan. Lama kursus bervariasi antara dua sampai empat tahun, dengan berbagai macam penamaan dan istilah. (Depdikbud, 1979 : 73).

b. Organisasi Guru Masa Pendudukan Jepang

Pada tahun 1943 di Jakarta didirikan suatu organisasi "GURU" oleh Amin Singgih bersama kawan-kawannya untuk memberikan teladan nyata, bahwa guru-guru Indonesia tetap menempuh kesatuan nasional. Jepang juga membuka pendidikan militer hasilnya dapat kita dapat nikmati antara lain : Jenderal Sudirman, Jenderal besar A. H. Nasution, Alamsyahroedin dan sebagainya. Orang-orang Jepang percaya bahwa kekuatan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan yang baik harus dilahirkan oleh guru-guru yang baik pula. Orang Jepang sangat menghargai dan menghormati guru dan dokter. Guru dan dokter mendapat panggilan kehormatan dari orang Jepang dengan sebutan "SEN-SEI" artinya mula-mula hidup atau yang dahulu sekali (orang yang tertua). Di sekolah-sekolah penggunaan Bahasa Belanda dilarang oleh Jepang termasuk bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Jepang harus diajarkan di sekolah-sekolah dengan huruf *katakana*, *hiragana* dan kanji. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah-sekolah sebagai bahasa pengantar dan juga dipergunakan di kantor-kantor. Organisasi di jaman Jepang dilarang menunjukkan aktivitas. (Hadiatmadja dkk, 2000: 13).

Agar terdapat keseragaman dalam pengertian dan maksud pemerintahan pendudukan militer Jepang. Maka, bagi guru diadakan latihan-latihan di Jakarta. Tiap-tiap kabupaten/daerah mengirimkan beberapa orang guru untuk dilatih. Setelah selesai dilatih tersebut, mereka kembali kedaerahnya masing-

masing untuk kemudian melatih guru-guru lainnya mengenai hal-hal yang mereka peroleh dari Jakarta. Bahan –bahan pokok yang mereka dapat dalam latihan ialah: 1). Indrokrinasi mental idiologi “*Hakko i-chiu*” dalam rangka kemakmuran bersama di “Asia Raya”. 2). Latihan kemiliteran dan semangat Jepang (*Nippon seisyin*). 3). Bahasa dan bahasa Jepang dengan adat istiadatnya. 4). Ilmu bumi ditinjau dari segi geopolitik. 5). Olah raga, lagu-lagu dan nyanyian Jepang. (Depdikbud, 1979 : 90)

c. Lahirnya Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia

Kemerdekaan Indonesia menjadi modal utama yang menyedutkan perjuangan dan jatidiri guru Indonesia. Jelas semangat mengisi hari depan Indonesia hanya bisa dihidupkan terus melalui proses kemajuan pendidikan. Para guru Indonesia menyadari betul semangat kemerdekaan sebagai perisai yang ampuh bagi proses perwujudan persatuan guru-guru Republik Indonesia. Motivasi ini pula yang mendorong proses lahirnya organisasi guru yang diharapkan bakal menjadi embrio bagi penerusan cita-cita kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, semangat melanjutkan profesi keguruan dilanjutkan oleh orang-orang peribumi Indonesia. Kehadiran organisasi para guru sebagai wadah dan sarana kaum guru yang sedang berevolusi kemerdekaan, merupakan manifestasi akan keinsyafan dan rasa tanggung jawab kaum guru Indonesia dalam memenuhi kewajiban akan pengabdianya serta partisipasinya kepada perjuangan menegakan untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Hadiatmadja dkk, 2000:19).

Sejarah mencatat munculnya dalam situasi perjuangan melawan Sekutu, dilangsungkan Kongres Pendidik Bangsa. Kongres yang berlangsung tepat 100 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan di Sekolah Guru Puteri (SGP) di Surakarta, Jawa Tengah yang digerakkan dan dipimpin oleh para tokoh pendidik guru, Amin Singgih, Rh. Koesnan dan kawan-kawan. Kongres selama dua hari, tanggal 24-25 November 1945 tersebut melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sejak saat itu PGRI lahir sebagai wadah perjuangan kaum Guru untuk turut serta menegakkan dan mempertahankan serta mengisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Nama PGRI sendiri diberikan oleh

utusan dari Jawa Barat yang berjiwa unitaristik yang saat itu bergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Priangan (PGSP). (PGRI, 2008:39)

Kongres pertama PGRI yang berlangsung seratus hari setelah kemerdekaan turut membantu membangkitkan semangat para guru. Hal itu sejalan dengan tujuan awal PGRI ketika didirikan, yaitu memperkuat berdirinya Republik Indonesia. Dengan tujuan seperti itu, PGRI merupakan salah satu organisasi perjuangan yang ada saat itu. Perjuangan tersebut bukan saja dilakukan melalui bangku sekolah, tetapi para guru juga turut mengangkat senjata melawan sekutu yang tidak berperan sesuai dengan tujuan kedatangan mereka ke Indonesia. NICA Belanda yang membonceng pada Sekutu berusaha kembali menguasai Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mau kembali dijajah. Rakyat bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) bahu-membahu mengangkat senjata melawan Sekutu dan Belanda. Demikian juga dengan para guru. Mereka rela meninggalkan tugasnya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka miliki. Tidak jarang para guru yang menjadi anggota TKR. Para guru perempuan banyak yang bertugas di dapur umum atau menjadi anggota Palang Merah Indonesia (PMI). Tidak sedikit dari mereka yang gugur sebagai pahlawan bangsa. (PGRI, 2008 : 42).

Perjuangan guru yang diwadahi oleh PGRI dalam masa kemerdekaan telah banyak berjasa bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya mendidik dalam rangka mencerdaskan bangsa, tetapi ikut pula dalam perjuangan fisik melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia dengan membonceng sekutu. Peran yang diambil oleh guru-guru Indonesia pada masa kemerdekaan telah banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia. Dengan perjuangannya pendidikan Indonesia mempunyai landasan dasar yaitu Pancasila. Pada masa perang kemerdekaan tujuan pendidikan menekankan pada rasa patriotisme untuk membantu mempertahankan perjuangan seiring dengan perjalanan waktu tujuan pendidikan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peran PGRI yang paling utama adalah mempelopori perubahan sistem pendidikan kolonial kearah system pendidikan nasional. Jika kita meneliti dalam mukadimah AD/ART PGRI dan meneliti kehidupannya organisasi, sejak kelahirannya sampai sekarang dapat disimpulkan sebagai berikut (Hadiatmadja, 2000:20):

- a. PGRI lahir karena hikmah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Organisasi ini merupakan manifestasi aspirasi kaum Guru Indonesia dalam mengambil bagian dan tanggung jawab sesuai dengan bidang profesinya sebagai pendidik untuk mengisi kemerdekaan yang dicita-citakan.
- b. PGRI mempunyai komitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. PGRI berbatang tubuh suatu organisasi berlandaskan proklamasi, karenanya organisasi ini dipandang sebagai pemersatu kaum guru yang bersifat: 1) unitaris, 2) independen, 3) non partai politik. Juga merupakan suatu sarana, wahana dalam kepentingan kaum guru bagi pengembangan profesinya, pendidikan pada umumnya serta pengabdian kepada tanah air dan bangsa.
- d. PGRI adalah organisasi profesi guru yang lahir dan mewariskan jiwa, semangat nilai-nilai 1945 secara terus menerus kepada setiap generasi Bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, organisasi yang menghimpun para guru dengan jelas mengambil peran pentingnya di awal Indonesia merdeka. Organisasi yang diberinama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah organisasi profesi guru yang lahir dan dilahirkan atas misi dan hikmah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. (Hadiatmadja, dkk, 2000, pendahuluan)

PGRI lahir sebagai "anak sulung" dari proklamasi 17 Agustus 1945, yang memiliki sifat dan semangat yang sama dengan "ibu kandungnya", yaitu semangat persatuan dan kesatuan, pengorbanan dan kepahlawanan untuk menentang penjajah. PGRI merupakan organisasi pelopor dan pejuang, karena itu para pendiri PGRI mengangkat semangat itu ke dalam tujuan pertama yang di atas. Sementara itu, tujuan yang kedua sangat erat hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi anggota PGRI sebagai pendidik bangsa, yang melalui proses pendidikan bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dari segi pendidikan. Tujuan yang ketiga berkaitan langsung dengan PGRI sebagai wahana meningkatkan perjuangan untuk perbaikan nasib anggotanya. PGRI adalah organisasi pejuang yang lahir dalam proses sejarah di masa perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. PGRI adalah wahana para

pejuang, pembangun bangsa, pembimbing putera, pembangun jiwa dan pencipta kekuatan Negara. Begitulah jiwa dan makna PGRI yang diungkapkan dalam "Mars PGRI" yang sepenuhnya cocok dengan kenyataan. (Yunus, dkk. 2003:7).

Sebagai organisasi profesi Guru dan jika dipandang dari segi profesi mempunyai jati diri yang terpancar pada empat ranah profesi yaitu Keahlian, Tanggungjawab, Kesejawatan atau Jiwa karsa, Pembaharuan (inovasi). (Hadiatmadja, dkk, 2000: 102)

Lahirnya PGRI telah menghapus segala bentuk perpecahan diantara kelompok guru kibat perbedaan ijazah, di lingkungan pekerjaan dan lingkungan daerah, aliran politik atau perbedaan agama dan suku. Hal itu sesuai dengan azas, tujuan dan cita-cita PGRI yang juga selaras dengan Proklamasi Kemerdekaan. Kongres Pertama PGRI telah merumuskan tiga tujuan mulia PGRI, yakni: 1). Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2). Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran dengan dasar kerakyatan. 3). Membela hak dan nasib buruh umumnya, serta hak dan nasib guru khususnya. 4). PGRI merupakan organisasi pelopor dan pejuang. Tujuan ini tegas mengacu kepada pola dan tata kehidupan bangsa berdasarkan UUD 1945 tidak terlepas dari jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan. Implikasi tujuan tersebut telah menyulut: a). Semangat persatuan dan kesatuan bangsa, pengorbanan dan kepahlwanan untuk menentang penjajah, neopenjajah kapitalisme, neokapitalis, b). Menguatkan tugas dan fungsi anggota PGRI sebagai pendidik bangsa yang melalui proses pendidikan bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dari segi pendidikan, c). Mengedepankan kepentingan PGRI sebagai wahana meningkatkan perjuangan untuk memperbaiki nasib para anggotanya dan para guru khususnya. d). Mendukung perumusan pancasilasebagai tata kehidupan bangsa dan UUD 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia. Data historis kongres pertama PGRI telah didekumentasikan Dalam Buku Perjalanan PGRI (1945-2003).

d. Periode awal Perjuangan Organisasi PGRI

Semangat perjuangan organisasi Guru-guru Indonesia diawal perjuangannya tidak hanya mengadakan kongres pertama untuk

mendirikan PGRI. Pada tahun-tahun berikutnya telah berhasil dilaksanakan beberapa kongres yang sangat artinya perumusan perjuangan PGRI. (PGRI, 2010) Kongres-kongres dan isi rumusan hasil kongresnya tercatat sebagai berikut:

1. **Kongres Pertama** : Kongres I PGRI di Surakarta tanggal 24-25 November 1945

Pada hari pertama, rapat tanggal 24 November 1945 disepakati pembentukan dan nama organisasi, sifat dan ketetapan tentang pusat administratif organisasi di Jakarta, tetapi untuk sementara waktu Solo.

Pada kongres ini disampaikan protes kepada seluruh dunia terhadap tindakan-tindakan tentara pendudukan di Indonesia. Garis besar protes tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alasan protes: perbuatan-perbuatan tentara pendudukan yang tidak sesuai dengan maksudpendudukan.
- b. Maksud protes: agar tentara pendudukan ditarik kembali dan tidak usah diganti karena Negara Republik Indonesia telah cakap menyelenggarakan keamanan dan ketenteraman dalam negeri
- c. Protes ditujukan kepada: Negeri-Negeri Serikat, Vatikan, dan Negeri-negeri Arab jua akan diberi tahun.

Rapat hari kedua 25 November 1945, ketetapan isi kongres berhasil membentuk susunan Pengurus Besar PGRI, yaitu seperti berikut:

Ketua : Amin Singgih
Wakil Ketua : 1. Rh. Koesnan
2. Soekitro
Penulis : 1. Djajengsoegito
2. Alimarsaban
Bendahara : 1. Soemidi Adisasmita
2. Siswowardjojo
Anggota : 1. Siti Wahjoenah (popy Sjahrir)
2. Martoswedigdo
3. Reksosobrot(siswardjojo)
4. Parmodjo

2. **Kongres Kedua** di Surakarta tanggal 21-23 November 1946.

Di tengah situasi politik dan keamanan yang bergolak, PGRI melakukan kongres II di Surakarta tanggal 21-23 November 1946. Dengan susunan PB PGRI sebagai berikut:
Ketua I : Rh. Koesnan

Ketua II : Soejono
Kromodimoeljo
Ketua III : Soedjono
Penulis I : J. Soetemas
Penulis II : Mh. Hoesodo
Bendahara I : Soemidi Adisasmita
Bendahara II : Dinneman
Ketua Bagian Pendidikan : DNotohamidjojo
Ketua Bagian Perburuhan : Sosro
Ketua Bagian Penerangan : Slamet I

Kongres ini menghasilkan tiga tuntutan yang diajukan kepada pemerintah, yaitu: a) sistem pendidikan agar dilakukan atas dasar kepentingan nasional. b) gaji guru supaya tidak dihentikan. c) diadakannya Undang-undang Pokok Pendidikan dan Undang-undang Pokok Perburuhan. Tuntutan ini kelak diperhatikan pemerintah dengan diangkatnya Rh. Koesnan menjadi anggota Panitia Gaji Pemerintah pada Kementerian Keuangan. Kemudian, Rh. Koesnan bersama Zahri diangkat menjadi anggota KNIP pleno. Terakhir, Rh. Koesnan bahkan menjadi Menteri Perburuhan dan Sosial pada kabinet Hatta.

Kongres II PGRI ini menghasilkan keputusan yang merupakan wujud dari tanggung jawab nasional PGRI dalam upayanya memelopori perubahan sistem pendidikan kolonial ke arah sistem pendidikan nasional. Pada kongres ini Presiden Sukarno hadir menegaskan dalam amanatnya: Guru bukan penghias alam, guru adalah pembentuk manusia seutuhnya, guru pendidik rakyat ke arah kejayaan dan keagungan bangsa; Semua orang bisa pandai/pintar dan sebagai patriot bangsa dan negara adalah hasil pendidikan para guru; Dalam menghadapi perjuangan dan pembangunan negara, guru harus menjadi pelopornya; Guru adalah penghimpun generasi muda, pemuda dan pemudi menjadi kompak bersatu bisa bersama-sama mengangkat gunung Semeru tertinggi di Jawa Timur ke Jakarta; Guru adalah pendidik untuk kesempurnaan jiwa/moral dan etika bangsa Indonesia, agar menjadi bangsa yang bermoral tinggi, beretika santun menjadi contoh bangsa lain di dunia.

3. **Kongres Ketiga**. Di tengah berkecamuknya perang kemerdekaan, PGRI menyelenggarakan kongres III pada tanggal 27-29 Februari 1948, Jawa Timur. Kongres yang berlangsung dalam keadaan darurat

menghasilkan keputusan-keputusan penting antara lain:

1. Menghapus Sekolah Guru C (SG C), yaitu pendidikan guru 2 tahun setelah sekolah rakyat.
2. Memekarkan cabang-cabang dengan jumlah anggota setiap cabang minimal seratus orang.
3. Membentuk komisariat-komisariat daerah pada setiap keresidenan /provinsi.
4. Menerbitkan majalah Guru Sasana (Suara Guru) sebagai sarana komunikasi Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah PGRI.

Kongres III menegaskan kembali haluan dan sifat perjuangan PGRI, yaitu:

1. Mempertahankan NKRI
2. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan falsafah Pancasila/tata kehidupan bangsa dan UUD 1945.
3. Tidak bergerak dalam lapangan politik(nonpartai politik)
4. Sifat dan siasat perjuangan PGRI adalah:
 - a. Bersifat korektif dan konstruktif terhadap pemerintah umumnya, Kementrian PP dan K khususnya dengan mempertahankan kebebasannya sebagai serikat sekerja.
 - b. Bekerjasama dengan serikat-serikat buruh/sekerja lainnya
 - c. Bekerjasama dengan badan-badan lainnya (partai politik, organisasi-organisasi pendidikan, badan-badan perjuangan)
5. Bergerak di tengah-tengah masyarakat. Adapun susunan Pengurus Besar hasil Kongres III adalah sebagai berikut :

Ketua I : Soejono kromodimoeljo

Ketua II : Soedjono

Ketua III : Soedarsono

Panitera Umum I : Brahim

Prawirosoemitro

Panitera Umum II : Indo Karjoso

Ketua Bagian Pendidikan : Soepojo

Ketua Bagian Perburuhan : Sostrowignjo

Bendahara : Dineman

Setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, PGRI memindahkan markasnya dari Solo ke Yogyakarta. Adapun susunan Pengurus Besar PGRI pada saat di Yogyakarta:

Ketua I : Soejono kromodimoeljo

Ketua II : Soedjono

Ketua III : Soedarsono

Sekretaris Umum I : Soekirno

Sekretaris Umum II : Indo Karjoso

Bendahara : Soewandi

Ketua Bagian Pendidika : Ali Marsaban

Ketua Bagian Perburuhan : Sosro

Ketua Bagian Publisiteit : Hj. Soemarto

Pada pada tahun 1948, di Madiun terjadi pemberontakan PKI. Ada juga guru yang terlibat dalam kegiatan ini. Peristiwa ini menjadi catatan kelam PGRI dalam masa perang kemerdekaan. Peristiwa penting lainnya yang terjadi pasca kongres III ialah keluarnya PGRI dari Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) pada tanggal 20 September 1948 karena SOBSI menjadi organisasi PKI.

Usaha PGRI dalam mengembangkan Pendidikan Indonesia

Sesudah kongres pertama PGRI mulai menyusun organisasinya dan meluaskan pengaruhnya ke segenap penjuru tanah air. Namun, gangguan jalannya organisasi PGRI di kota-kota besar lainnya tidak luput dari gangguan Belanda dan blokadanya yang mempersempit ruang gerakannya. Ketika pemerintah RI kembali dari Bukit Tinggi ke Yogyakarta pada tahun 1949, berdirilah cabang-cabang PGRI sampai ke daerah di luar persetujuan Renville, meskipun tanpa ada perintah dari PB PGRI. Pada saat itu kedudukan PB PGRI yang semula di Surakarta dipindahkan ke Yogyakarta. Kegiatan PGRI pun meningkat kembali diberbagai daerah, baik di pusat (Yogyakarta) maupun di daerah-daerah BFO (*Byzonder Federal Overleg*). Di pusat, PB PGRI dengan tenaga-tenaga inti dibantu oleh tenaga-tenaga lainnya mulai mengembangkan sayapnya. Di daerah-daerah serentak dihimpun kembali tenaga-tenaga yang sebelumnya berserakan. Mereka saling mengadakan kontak untuk mengkonsolidasikan organisasi. Dalam bidang politik, dua orang wakil PGRI ditunjuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan parlemen sementara RI. Pengakuan politis yang sangat tinggi kepada PGRI juga diperoleh dari amanat Presiden Soekarno pada Kongres II PGRI tahun 1946 di Surakarta. Dalam amanat tersebut, Presiden Soekarno menegaskan bahwa, guru

bukanlah penghias alam, tetapi guru adalah pembentuk manusia, guru adalah pendidik rakyat ke arah kejayaan dan keagungan bangsa, semua orang pandai dan patriot-patriot negara adalah hasil pendidikan para guru, dalam menghadapi perjuangan dan pembangunan Negara guru harus mendidik pelopornya, guru adalah pendidik rakyat ke arah kesempurnaan jiwa yang bercita-cita tinggi bagi bangsa dan Negara. (PGRI, 2008 :45).

Dalam usaha meningkatkan pendidikan mulai dilaksanakan dengan bernafaskan, peralihan dari pendidikan yang berifat kolonial ke pendidikan Nasional. sebagai media organisasi dan meningkatkan komunikasi, maka pada tahun 1948 PGRI mulai menerbitkan majalah *Guru sasana*, yang kemudian berubah menjadi majalah *suara Guru* sampai sekarang. (Hadiatmdja,dkk. 2000:24).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait perjuangan organisasi guru di masa revolusi, khususnya terkait sejarah eran organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diawal kemerdekaan Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam revolusi di bidang pendidikan di awal Indonesia merdeka menyangkut penyesuaian dengan cita-cita dari suatu Bangsa dan Negara Merdeka. Panitia Penyelidik Pengajaran yang di ketuai oleh Ki Hadjar Dewantara telah berhasil merumuskan landasan idiil yang diambil dari falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila. Hasil lainnya adalah ketetapan dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional, sistem sekolah serta kesempatan belajar bagi rakyat Indonesia. Mengenai tujuan pendidikan dirumuskan bahwa, pendidikan bertujuan mendidik warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Pada awal kemerdekaan, pendidikan Indonesia lebih menekankan kepada bagaimana menanamkan rasa nasionalisme dan berjiwa patriotisme untuk mempertahankan kemerdekaan.
2. Terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia adalah hasil dari perjuangan guru-

guru Indonesia. Perjuangan Guru telah dimulai dari masa Hindia Belanda dengan adanya oraganisasi Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912. Persatuan Guru Hindia Belanda kemudian mengalami perubahan menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Pada tanggal 23-25 November 1945 diadakan kongres Guru, yang menghasilkan Persatuan Guru Republik Indonesia. Dalam situasi perjuangan rakyat melawan sekutu, guru-guru mengadakan kongres yang dilaksanakan di Sekolah Guru Puteri (SGP) gedung Van De Vanter, sekarang SMP 3 Surakarta Jawa Tengah. Sebagai penggerak dan pemimpin adalah Amin Singgih dan Rh. Koesnan. Kongres dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 25 November 1945. Hasil kongres tersebut adalah guru-guru sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang bisa mewadahi aspirasi dan perjuangan guru untuk kemajuan bangsa Indonesia. Atas usulan dari Persatuan Guru Seluruh Periang (PGSP) dari Jawa Barat yang mengusulkan nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Seluruh peserta kongres sepakat dan menyetujui berdirinya suatu organisasi yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

3. Setelah terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Republik Indonesia terus berjuang menggalang persatuan dengan mengajak guru-guru di daerah untuk bergabung kedalam PGRI. Namun, perjuangan itu tidaklah mudah karena mendapat rintangan dari pihak Belanda. Persatuan Guru Republik Indonesia merasa bangga dikarenakan Rh.Koesnan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan Sosial dalam kabinet Moh. Hatta. Peran Guru Republik Indonesia pada masa Revolusi Indonesia adalah ikut merumuskan tujuan Pendidikan Indonesia, serta meletakkan dasar bagi pendidikan yaitu dijadikannya Pancasila sebagai landasan idiil Pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Depdikbud.1979
Eisenstadt, S. N. 1986. Revolusi dan transformasi masyarakat, (terj.) Candra Johan Jakarta: CV. Rajawali.

- Hadiatmadja, R.A. Soepardi., dkk., 2000. Pendidikan sejarah perjuangan PGRI (PSP-PGRI), Jilid II, III, IV, V. Semarang : IKIP PGRI
- Kahin, George Mc. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Nin Bakdi Somenato (Penterj.), Jakarta – Sinar Harapan & Sebelas Maret University Press.
- Kartodirdjo, Sartono.. dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ricklefs, M.C., 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta – PT. Ikrar
- PGRI., 2008. Buku Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI
- _____. 2010. “Sejarah Lahirnya PGRI Dan Kongres PGRI <http://pgrikarangtengah.blogspot.com/2010/07/tujuan-organisasi-pgri.html/> Diakses pada 22 Mei 2014.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1970. *Pendidikan dalam Indonesia merdeka*. Jakarta: Gunung Agung
- Said, Muh. dan Junima Affan, 1987. *Mendidik dari zaman ke zaman*, Bandung: Jemmars.,
- Sjamsuddin, Helius. 1993. Sejarah pendidikan di Indonesia zaman kemerdekaan (1945-1950). Depdikbud. Jakarta
- Sumarsono, Moestoko.1986. *Pendidikan Indonesia dari jaman ke jaman*. Balai Pustaka: Jakarta
- Tilaar, H.A.R., 2002. *Pendidikan untuk masyarakat Indonesia*. Jakarta – PT Gramedia
- Yunus., 2003. *PGRI dari masa ke masa*. Jakarta: PGRI YPLP.

